**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PAKKANNA KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO**

**Managing the village business establishment in Pakkanna district district Tanasitolo**

**Oleh:**

**Sri Rahma Putri**1

**Dr. Suardi, S.Pd., M.Pd2**

**Dr. Rudi Amir, M.Pd3**

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Makassar

Jalan: Tamalate 1 Tidung, Makassar KP.90222

[Srirahmaputri08@gmail.com](mailto:Srirahmaputri08@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menfokuskan penelitian pada bagaimana pengelolaan BUMDes di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang meliputi Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (penggerakan), Controlling (pengawasan). Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini yaitu pemerintah desa dan pengurus BUMDes. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni, rudiksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sudah berjalan dengan baik dilihat dari tingkat keberhasilan berbagai program unit usaha yang dilaksanakan. Namun demikian, pengelolaan BUMDes khususnya pada proses pengawasan masih kurang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Pakkanna.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, fungsi pengelolaan.

***Abstract:*** *the study is conducted to find out how managing the village business administration of pakkanna district tanasitolo district of wajo. The study employs a qualitative research approach with a type of case study. In this study researchers focused on research on how the management of the bumdes in the village of*

*pakkanna district of wajo including planning (planning), organization (organization), actuating (movement), organizing (supervision). Data collection techniques are observations, interviews, documenting. The data source of this research was the village government and the bumdes administration. The data analysis techniques in the study include data interpretation, data presentation, and verification. Research shows that the management of the village's corporate enterprise in pakkanna village, tanasitolo of the wajo district, has been well viewed from the success rate of the joint venture. Nevertheless, the management of bumdes especially on surveillance still has little to do with village and community control of the village's pakkanna business.*

*Key words: village enterprises, managerial functions.*

**PENDAHULUAN**

Desa saat ini tidak lagi ditempatkan sebagai latar belakang Indonesia melainkan telah menjadi halaman depan Indonesia. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa pengembang paradigma baru dalam membangun Desa dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa menjadi salah satu program desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pembentukan BUMDes dilakukan untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaaa, ketersediaaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai pijakan awal pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Salah satu BUMDes yang cukup berprestasi adalah BUMDes di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Desa Pakkanna memiliki banyak inovasi-inovasi dalam bidang perekonomian. Tentunya hal itu pula yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi desa pakkanna ini. Jumlah unit usaha yang dijalankan sudah ada berbagai macam usaha yaitu 1 (satu) unit usaha permodalan (simpan pinjam) yang memiliki jumlah anggota sebanyak 8 orang, 1 (satu) unit usaha kerajinan tangan seperti kain sutra yang dijadikan sarung, selendang yang memiliki jumlah anggota sebanyak 13 orang, 1 (satu) unit usaha perdagangan umum dalam hal pemanfaatan pasar BUMDes memiliki jumlah anggota sebanyak 15 orang. Usaha ini dikelola oleh pengurus BUMDes yang ada di Desa Pakkanna dan diberi nama BUMDes “HIDAYAH”. Apabila BUMDes Hidayah ini dikelola dan terus dikembangkan secara optimal maka pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan PADes akan meningkat. Misal pada program pasar sore, banyak ibu-ibu rumah tangga yang memanfaatkan keahlian mereka dalam mengolah makanan sehingga produk-produk atau makanan yang dibuat oleh masyarakat akan dikelolah menjadi sebuah usaha oleh pemerintah desa sehingga bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi apabila dikelola dengan baik. Melihat dari unit usaha yang berhasil maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan yang ada di BUMDes yang ada di Desa Pakkanna.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengeksplorasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Pakkanna Kacamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo**.** Sehingga diperoleh infomasi tentang bagaimana Pengelolaan BUMDes di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

**KAJIAN PUSTAKA**

**Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan tejemahan dari kata “management”, terbawah oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal

dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi Istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untukmencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menejemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.

**Fungsi Pengelolaan**

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Terdapat beberapa fungsi pengelolaan. George R. Terry dalam Sukarna (2011:10) menuliskan empat fungsi pengelolaan yang dikenal dengan istilah POAC, yaitu:

a. Planning (perencanaan)

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai suatu hasil yang di inginkan dan juga proses mendefinisikan tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan.

1. Organizing (pengorganisasian);

Pengorganisasian adalah

keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

1. Actuating (penggerakan)

Penggerakan adalah membangkitan dan mendorong semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan dengan ikhlas sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

1. Controlling (pengawasan)

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan digunakan untuk mengukur pelaksanaan yang akan dilakukan dengan tujuan mengawasi pengelolaan sesuai dengan rencana awal.

**Tujuan Pengelolaan**

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

**Definisi BUMDes**

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dikuasai oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya tata aturan yang dilaksanakan terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid, dengan penguatan kapasitas kelembagaan yang terarah terhadap tata aturan yang mengita seluruh anggota. Adapun jenis–jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa Hidayah diantaranya Unit usaha Permodalan, kegiatan yang dilakukan yakni simpan pinjam. Unit perdagangan umum, kegiatan yang dilakukan yakni pasar desa, penjualan sembako. Unit ekonomi kreatif, kegiatan yang dilakukan yakni

pembuatan kerajinan tangan, cendramata.

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDEs menurut Kamaroesid (2016:20) yaitu sebagai berikut:

1. Kooperaif, artinya bersifat kerjasama maka dalam menjalankan dan mengelola BUMDes pihak yang terlibat harus melakukan kerjasama yang baik.
2. Partisipatif, semua yang menjadi bagian yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes memiliki kewajiban dan kesadaran untuk berpartisipasi penuh dalam memberikan kontribusi untuk kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif,dalammenjalankan

dan mengelola BUMDes pihak yang terlibat memiliki hak yang sama, diperlakukan secara sama tanpa memandang golongan, suku, agama atau strata sosial dan jabatan.

1. Transparan, berarti dilakukan secara terbuka dalam menjalankan dan mengelola BUMDes, pengelola harus berlaku terbuka dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
2. Akuntabel, artinya dapat dipertanggung jawabkan mengenai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi. Peranggungjawaban yang dimasud adalah pertanggungjawaban secara teknis dan administrasi.
3. Sustainabel, kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat berarti kegiatan yang dilaksanakan harus kegiatan usaha yang berkelanjutan.

**METODE PENELITIAN**

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan yaitu Kepala Desa Pakkanna, 4 pengurus BUMDes diantaranya 1 orang Bendahara BUMDes, 1 orang Sekertaris

BUMDes, dan 1 orang ketua unit usaha BUMDes.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan verifikasi atau penarik kesimpulan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Berdasarkan deskripsi dari hasil wawancara dengan informan, maka berikut adalah rangkuman hasil wawancara yang telah dilakukan berdasarkan indicator berikut:

1. Planning (perencanaan)

Perencanaan dalam suatu organisasi tentu sangat dibutuhkan karena dengan adanya sebuah perencanaan maka sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik. Perencanaan dalm hal ini untuk mengidentifikasi tujuan dan prosedur dalam proses pelaksaaan program BUMDes, membuat program unit kerja BUMDes. Pemerintah desa pakkanna juga turut berperan dalam perencanaan unit usaha BUMDes karena pada dasarnya BUMDes merupakan milik desa. Begitupun dengan para pengurus BUMDes sudah berperan untuk menetapan tujuan program kegiatan BUMDes Hidayah.

Penetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh BUMDes Hidayah adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan perekonomian masayarkat dan desa.

1. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian dalam hal ini menyangkut keseluruhan proses pengelompokan orang, tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan untuk mecapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidayah dalam pembagian kerja atau tugas sudah sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing pengurus BUMDes,

sehingga pembagian pekerjaan dapat berjalan secara efektif.

1. Actuating (penggerakan)

Berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah–perintah atau intruksi kepada pengurus dalam melaksanakan tugas masing–masing, agar tugas yang dilaksanakan berjalan dengan baik. pengurus BUMDes Hidayah sangat terbantu akan adanya bimbingan yang diberikan oleh atasan, berdiskusi dengan atasan maupun dengan para sesama pengurus BUMDes dapat membantu pekerjaan para pengurus berjalan dengan baik.

1. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan. Pengawasan sebagai proses penentuan,apa yang harus dicapai,apa yang harus dilakukan, sehingga pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Pengawasan yang dilakukan pada BUMDes Hidayah dilakukan melalui musyawarah desa yang dilakukan 6 bulan sekali.

**PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidayah di desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 78, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa haruslah didasarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan tentang

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidayah.

1. **Planning (perencanaan)**

Perencanaan dalam usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya suatu perencanaan maka suatu usaha tidak bisa berjalan dengan baik.

Perencanaan pada awalnya tidak terlepas dari pengetahuan dan keahlian pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri dengan tujuan dan sasaran yang ingin diperoleh. Adapun indicator-indikator perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tujuan program kegiatan Badan Usaha Milik Desa

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan perekonomian desa. Adapun tujuan dari BUMDes Hidayah itu sendiri yaitu mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa pakkanna, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha bagi masyarakat desa pakkanna, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa pakkanna, meningkatkan pendapatan desa.

1. Menetapkan prosedur dalam pelaksanaan program BUMDes

Suatu organisasi harus ada prosedur yang jelas dan baik dalam menjalankan program atau unit usaha. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memliki prosedur disetiap unit usahanya. Seperti halnya adaanya bendahara khusus di setiap unit usaha BUMDes Hidayah, hal ini bertujuan untuk mempermudah pencatatan laporan keungan pada setiap unit usaha yang akan disetor kepada bendahara umum BUMDes. Tentu hal ini sangat membantu bendahara umum BUMDes untuk laporan keuangan BUMDes secara keseluruhan termasuk biaya pengeluaran, pendapatan dan keuntungan tiap unit usaha. setiap unit usaha yang ada sudah dijalankan dan prosedur yang dijalankan sudah berjalan dengan baik sehinggah mempermudah masyarakat dalam meminjam dana untuk keperluan menambah modal usaha atau mengembangkan usahanya

1. Membuat Program/Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa

Didalam organisasi yang baik harus mempunyai program yang baik pula, sehingga output nya bisa

dirasakan oleh masyarakat. Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini yaitu unit simpan pinjam, unit kerajinan dan parawisata, unit perdagangan (pasar sore). Tentunya program tersebut dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan melihat potensi desa yang ada. Pembentukan unit usaha tersebut ditetapkan pada saat musyawarah desa bersamaan dengan penentuan tujuan program unit usaha BUMDes.

1. **Organizing (pengorganisasian)**

Pengorganisasian dalam hal ini menyangkut keseluruhan proses pengelompokan orang, tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan untukmecapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah hasil penelitian yang di lakukan terkait indikator organizing (pengorganisasian) yang di peroleh dari hasil observasi wawancara dan dokumentasi:

1. Penempatan tugas dan fungsi

Keterlibatan pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah bagian yang sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan BUMDes. Bahwa susunan kepengurusan dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa. Kepengurusan BUMDes Hidayah dapat dilihat dari adanya stuktur organisasi BUMDes yang telah dibuat. Setiap unit usaha mempunyai penanggung jawab masing-masing, sepeti halnya pada unit usaha permodalan yang dipilih untuk bertanggung jawab pada unit usaha tersebut yang memiliki pengalaman mengelolah keungan/pendanaan.

1. Penetapan wewenang dalam pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa

Didalam organisasi yang baik sangat dibutuhkan wewenang atau hak untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapainya suatu

tujuan yang ingin dicapai oleh pengurus BUMDes. Penetapan wewenang juga membuat pengurus BUMDes Hidayah bisa melakukan tugas dengan tanpa adanya intimidasi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidayah bahwa setiap wewenang yang diberikan kepada pengurus BUMDes sudah mengetahui dan mengerti akan wewenangnya masing–masing. Suatu pengorganisasian dilakukan agar setiap pengurus yang diberikan wewenang tahu akan tugas dan wewenang masing-masing sehingga tujuan dari BUMDes bisa tercapai secara maksimal.

1. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang telah yang diamanahkan

Tanggungjawab yang dimaksud adalah pengurus BUMDes mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepada pengurus sehingga tujuan pengelolaan BUMDes terlaksana dengan sebaik mungkin. kepengrusan BUMDes Hidayah mempunyai struktur organisasi yang didalamnya memuat tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggungjawab atau pun beban yang sudah diberikan kepada para pengruus BUMDes Hidayah, hal itu telah ditetapkan dalam AD/RT. Adapun bentuk tanggungjawab pengrus BUMDes Hidayah yaitu diwajibkan menyampaikan hasil kerja mereka kepada atasan melalui laporan pertanggung jawaban. bentuk tanggung jawab tersebut sudah dijalankan dengan baik olehkpengruus BUMDes

1. **Actuating (penggerakan)**

Berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah–perintah atau intruksi kepada pengurus dalam melaksanakan tugas masing–masing, agar tugas yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan terkait indikator actuating (penggerakan) yang di peroleh dari hasil observasi wawancara dan dokumentasi.

1. Bimbingan yang bersifat membangun dalam suatu kegiatan.

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok agar bisa memahami setiap pekerjaannya, sehingga sanggup mengerahkan seluruh kemampuannya dan dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengurus BUMDes Hidayah sangat terbantu akan adanya bimbingan yang diberikan oleh atasan, berdiskusi dengan atasan maupun dengan para sesama pengurus BUMDes dapat membantu pekerjaan para pengurus berjalan dengan baik. Pemberian bimbingan dilakukan di kantor sekertariat BUMDes yang melibatkan seluruh pengurus BUMDes, anggota BPD, dan toko masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa pakkanna. Tujuan dari pertemuan tersebut yakni membahas tentang permasalahan yang ada di BUMDes, sebelum dilakukan bimbingan oleh para atasan atau oleh pembina. Bimbingan yang dilakukan lebih kearah sharing antara pengurus BUMDes dengan pihak yang hasir dalam pertemuan tersebut.

1. Saran yang diberikan atasan kepada bawahan dalam melakukan tugas dan fungsinya sehingga bawahan bisa bekerja lebih giat lagi.

Saran merupakan sebuah solusi yang ditunjukkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi yang bersifat membangun, mendidik, serta objektif sesuai dengan permasalahan yang ada sehingga pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidayah dalam melakukan tugasnya harus bisa bekerja lebih giat lagi. Para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidayah ini telah diberikan saran maupun motivasi kerja agar para bawahan maupun atasan lebih giat lagi dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab mereka. Para sesama pengurus juga selalu memberikan motivasi kepada rekan

kerja untuk selalu bekerja dengan giat.

1. Pemberian Perintah

Tujuan utama dalam pemberian perintah oleh atasan kepada bawahan adalah untuk memberikan kegiatan pada bawahan, agar kegiatan para pengurus terkooordinasi dengan baik. Adapun prosedur pemberian perintah pada BUMDes Hidayah melalui direktur yang memberikan perintah kepada kepala unit usaha dan barulah ke staf yang berada dibawahnya. Selain itu pimpinan juga jika berkesempatan langsung emberikan perintah kepada para pengurus BUMDes Hidayah sehingga tidak ada jarak antaran atasan dan bawahan.

1. **Controlling (Pengawasan)**

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan. Pengawasan sebagai proses penentuan,apa yang haru dicapai,apa yang harus dilakukan, sehingga pelasanaan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Adapun indicator dalam pengawasan sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur serta melakukan penilaian

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar yang harus ditetapkan sehingga dapat menilai apa yang terjadi dalam melaksanakan program.

Pengawasan yang dilakukan pada BUMDes Hidayah dilakukan melalui musyawarah desa yang dilakukan 6 bulan sekali bersama dengan para pengruus BUMDes, pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang berpadu pada peraturan desa. Pelaksanaan pengawasan oleh pengawas dilakukan 6 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan di kantor sekertariat BUMDes, badan pengawas dapat memberikan koreksi atau saran kepada pelaksana operasional atau pengurus saat melaksanakan tugasnya. Objek pemeriksaan yaitu berita acara, kelengkapan transaksi, kuitansi dan nota, administrasi keuangan serta

administrasi umum lainnya yang berkaitan dengan pembukuan, pelaporan keuangan dan unit kerja lainnya yang melipu laporan pertanggung jawaban.

1. Mengadakan tindakan perbaikan dalam suatu kegiatan

Ini merupakan fase terakhir dalam proses pengawasan yang harus dilaksanakan .sebab dalam fase ini sangat menentukan arah penyimpangan yang ada, apakah dibiarkan begitu saja atau dilakukan perubahan sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidayah tidak ditemukan penyimpangan–penyimpangan. Namun, terdapat kendala perihal pendanaan

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sudah berjalan dengan baik dilihat dari tingkat keberhasilan berbagai program unit usaha yang dilaksanakan. Namun demikian, pengelolaan BUMDes khususnya pada proses pengawasan masih kurang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Pakkanna.

**Saran**

* + - 1. Diharapkan kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu membuat program – program usaha lainnya dengan memkasimalkan potensi desa yang tersedia, agar lebih meningkatkan kesadaran berorganisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menunjang kesuksesan badan usaha milik desa ( BUMDes ) di Desa Pakkanna.
      2. Diharapkan agar pengurus badan usaha milik desa ( BUMDes ) lebih mendorong atau menggerakkan anggota yang lainnya agar mau bekerja lebih giat agar bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arwendria. 2010. Manajemen

Bawono Icuk Rangga. 2019. *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia.* Jakarta:Grasindo

Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju

Harsono. 2010. *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Ibrahim,M. 2018. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*. Yogyakarta: LeutikaPrio.

Ibrahim. 2019. Faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Unpad.* Vol.21(3): 351-152

Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa .* Jakarta. Mitra Wacana Media.

Kurniawan, B. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kusumadewi, L. R. 2010. Kembalinya Subyek: Sosiologi Memaknai Kembali Multikulturalisme. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol.15 (64): 14-18

Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat 2, tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Rakyatku News. 2019. *Kemendes Canangkan*

*Kawasan Desa Wisata Terpadu Danau Tempe*.

<http://www.google.com/amp/news.rakyatku.com>. diakses pada tanggal 6 Februari 2020, pukul 19.10

Satori Djam’an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alabeta

Siagian, 2003. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Bumi Aksara

Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sondang P. 2004. *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binarupa Aksara

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung: Alfabeta.

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen.* Bandung: Mandar Maju

Sule Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada

Media. Umar. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Yunus Edi. 2016. *Manajemen Strategis.* Yogyakarta: A